

Model Pemberdayaan Masyarakat Dalam Upaya Pembangunan Ekonomi Lokal Berbasis Produksi Di Pedesaan

Community Empowerment Model In Production-Based Local Economic Development Effort in Rural Areas

Wahyu Windari

Politeknik Pembangunan Pertanian Malang, Jawa Timur, Indonesia

Email: wahyu_windari@yahoo.com

ABSTRAK

Tujuan dari penulisan makalah ini adalah membuat model pemberdayaan masyarakat dalam upaya pembangunan ekonomi lokal berbasis produksi di pedesaan. Dasar dari pembuatan model adalah telaah UU Desa No 6 Tahun 2015 dan Rencana Strategi Kemendes Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2015 – 2019 serta PP tentang Dana Desa No 50 Tahun 2015. Dalam Renstra Kemendes PDTT terdapat 4 strategi yang ditetapkan oleh kementerian perdesaan, dan dari ke-4 strategi tersebut yang dianggap penting dan bersinggungan langsung dengan masyarakat desa dalam pemenuhan pangan adalah strategi ke-3 yaitu upaya pembangunan ekonomi lokal berbasis produksi di pedesaan. Analisis kebijakan digunakan model Pearson untuk mencari solusi terhadap kesenjangan antara tujuan dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hasil akhir dari analisis kebijakan yang dilakukan adalah diusulkan model pemberdayaan dalam upaya meningkatkan pendapatan petani melalui penguatan kelembagaan, dan pembentukan desa mandiri spesifik lokalita melalui pendampingan.

Kata Kunci: *Analysis Kebijakan, Desa Mandiri, Spesifik Lokalit, Pemberdayaan*

ABSTRACT

This paper aims to create a model of community empowerment to develop a local economy based on production in rural areas. The basis of modelling is Law No. 6 of 2015 and The Strategic Plan of Ministry of Rural Development of Disadvantaged Regions and Transmigration Year 2015 – 2019. Also, Government regulation on Village Fund No. 50 the Year 2015. The rural ministry establishes four strategies. The four strategies that are considered essential and in direct contact with the villagers in the fulfilment of food is the 3rd strategy that is local economic development efforts based on production in the countryside. Policy analysis used the Pearson model to find solutions to the gap between the objectives and the constraints faced in improving the community's welfare. The final result of the policy analysis is the proposed empowerment model to increase farmers' income through institutional strengthening and the establishment of specific villages localities through assistance.

Keywords: *Policy Analysis, Mandiri Village, Locality Specific, empowerment*

PENDAHULUAN

Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani merupakan isu yang sering diperdengarkan di seluruh antero negeri. Berbicara tentang petani dan kesejahteraan tidak bisa terlepas begitu saja dari pedesaan, hal ini disebabkan terutama di negara sedang berkembang, sebagian besar penduduknya berada di pedesaan dan bekerja di sektor pertanian. Kurangnya infrastruktur yang memadai ditambah lagi dengan jauhnya lokasi desa dengan daerah perkotaan atau pembangunan menyebabkan sulitnya mereka bekerja di luar sektor pertanian. (Yustika, 2003:27). Dengan kondisi tersebut, tidaklah mungkin menyelenggarakan pembangunan di negara berkembang tanpa melibatkan wilayah pedesaan. Pembangunan di negara berkembang dapat dikatakan berhasil apabila sebagian besar penduduk pedesaan dapat melakukan mobilitas social – ekonomi dan apabila ini terjadi dapat diartikan bahwa pembangunan yang dilakukan pemerintah dapat menjangkau warga negaranya.

Masalah lain yang muncul di pedesaan yang tidak bisa dihindari adalah tingginya alih fungsi lahan, rendahnya tingkat produktifitas pertanian, minimnya penerapan inovasi dan teknologi pertanian, dan perubahan iklim yang tidak menentu yang dapat memicu meningkatnya peralihan lapangan pekerjaan dan ada kemungkinan mendorong migrasi penduduk dari desa ke kota. Berdasarkan pemikiran tersebut perlu dilakukan perumusan kebijakan pembangunan pedesaan mengingat kondisi pedesaan yang nota bene adalah kawasan pertanian.

Dewasa ini keseriusan pemerintah terhadap pembangunan pedesaan mulai terlihat, dengan diterbitkannya Undang-undang tentang

Desa Nomor 60 Tahun 2015 yang terdiri dari 16 Bab dan 122 pasal merupakan upaya mendudukkan dan membangun desa menjadi sentral pembangunan. Hal ini merupakan perwujudan dari Visi Tri Sakti Presiden periode 2014-2019 yang meletakkan titik berat pencapaian ideal bangsa Indonesia pada kedaulatan politik, kemandirian ekonomi dan kepribadian budaya. Untuk merealisasikan visi tersebut pemerintah bertekad (dalam nawa cita) membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan desa tersebut pemerintah dalam Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2015-2019 secara umum menetapkan 6 arah pembangunan pedesaan yaitu : 1) mengurangi kemiskinan dan kerentanan ekonomi di pedesaan, 2) memenuhi standart pelayanan minimum khususnya di desa tertinggal dan perbatasan, 3) tata kelola pemerintahan desa yang baik, 4) meningkatkan keberdayaan masyarakat pedesaan, 5) mewujudkan desa berkelanjutan dan 6) membangun keterkaitan desa-kota melalui pembangunan perekonomian hulu – hilir dan industrialisasi pedesaan khususnya di desa yang telah berkembang dan mandiri yang terkait dengan industry dari pusat-pusat pertumbuhan terdekat. (Anonimous, 2015).

Dari 6 kebijakan tersebut terdapat 4 langkah strategis yang ditetapkan guna mencapai 6 kebijakan pokok sebagaimana tersebut di atas. Keempat langkah strategis tersebut adalah sebagai berikut : 1) mendasarkan desa pada aspek partisipatif (mengarusutamakan perdamaian dan keadilan social), 2) membangun sinergitas antar aktor sebagai kunci pelaksanaan implementasi

Undang-Undang Desa, perlu adanya penguatan koordinasi dan keterlibatan aktif seluruh stake holder dan LSM, dunia usaha, universitas dan media, 3) upaya pembangunan ekonomi lokal mandiri berbasis produksi (menunjang upaya penguatan ekonomi nasional dan ketahanan pangan dan energy yang kuat), 4) percepatan penyaluran dan penggunaan dana desa dalam menggerakkan sektor ekonomi riil ekonomi desa. Ke-4 langkah strategis tersebut dicanangkan karena desa merupakan penggerak sektor ekonomi riil di desa.

Dari ke-4 kebijakan tersebut yang dipandang sebagai kebijakan paling strategis adalah upaya pembangunan ekonomi lokal mandiri berbasis produksi (menunjang upaya penguatan ekonomi nasional dan ketahanan pangan dan energy yang kuat). Sebenarnya ke-4 langkah strategis yang dicanangkan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan karena keempatnya saling berhubungan dan saling menunjang kegiatan pembangunan di pedesaan. Namun demikian strategi ke-3 adalah hal pokok yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan dasar petani yaitu ketahanan dan keamanan pangan.

Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan bagi masyarakat pedesaan dengan melihat dan mencermati kondisi petani di pedesaan serta system usahatani yang mereka jalankan masih perlu penataan dan perbaikan manajemen usahatani untuk dapat membuat mereka dapat sejahtera dari usaha yang mereka jalani. Sistem budidaya seadanya, parsial dan tidak dipahaminya system usaha agribisnis menyebabkan pembangunan ekonomi daerah pedesaan mengalami banyak hambatan. Pendampingan adalah model pendekatan yang dapat dilakukan untuk membantu petani keluar dari permasalahan klasik yang terjadi selama

ini. Melihat dari kondisi lapangan tersebut maka tujuan dari makalah ini adalah menetapkan dan menganalisis kebijakan pembangunan pedesaan untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam mengatasi permasalahan pembangunan pedesaan di bidang pembangunan ekonomi lokal mandiri berbasis produksi.

METODE PENELITIAN

Studi literatur dengan mencari referensi teori yang relevan dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan digunakan dalam penyusunan makalah ini. Referensi teori yang diperoleh dengan studi literatur dijadikan sebagai dasar dan alat dalam pembuatan model pemberdayaan. Sumber literatur berasal dari berbagai sumber yaitu, jurnal, buku dokumentasi, internet dan pustaka. Data-data yang sudah diperoleh kemudian dianalisis dengan metode analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif dilakukan dengan cara mendeskripsikan fakta-fakta yang kemudian disusul dengan analisis, tidak semata-mata menguraikan, melainkan juga memberikan pemahaman dan penjelasan secukupnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keamanan dan Ketahanan Pangan

Kebijakan strategis tentang pembangunan ekonomi lokal mandiri berbasis produksi diperlukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat pedesaan. Kecukupan pangan baik kualitas maupun kuantitas merupakan hal paling pokok dalam kehidupan manusia, sehingga kedua hal tersebut merupakan kebijakan strategis yang seharusnya diprioritaskan. Hal ini sesuai dengan pernyataan World Bank (1986a:1) dalam Ellis (1992) yang

menyebutkan “*food security is acces by all people at all times to enough food for an active, healthy life. Its essensial elements are the availability of food and the ability to acquire it. Food insecurity, in turn, is the lack of access to enough food*”.

FAO (1997) sebagaimana yang disampaikan oleh Hanafie (2010) dalam buku yang berjudul Pengantar Ekonomi Pertanian mendefinisikan ketahanan pangan sebagai situasi dimana semua rumah tangga mempunyai akses, baik secara fisik maupun ekonomi untuk memperoleh pangan bagi seluruh anggota keluarganya dan rumah tangga tidak beresiko untuk mengalami kehilangan kedua akses tersebut. Ini berarti bahwa konsep ketahanan pangan mencakup ketersediaan yang memadai, stabilitas dan akses terhadap pangan utama. Lebih lanjut disampaikan bahwa strategi yang diterapkan dalam rangka keberhasilan pembangunan ketahanan pangan adalah : 1) pemberdayaan ketahanan pangan masyarakat, 2) pengembangan system usaha agribisnis, 3) mewujudkan kebersamaan antara masyarakat sebagai pelaku dan pemerintah sebagai fasilitator, 4) menumbuhkan ketahanan pangan pada tingkat rumah tangga, mengelola produksi pangan dengan baik dalam memenuhi konsumsi keluarga, dan mampu menyalurkan kelebihan produksi pangan untuk memperoleh harga yang wajar. Di pihak lain, kesadaran masyarakat akan pentingnya penganekaragaman pangan dengan mutu pangan yang dikonsumsi harus semakin meningkat dalam mewujudkan ketahanan pangan pada tingkat rumah tangga, 5) Pemantapan koordinasi dan sinkronisasi terkait perencanaan dan kebijakan.

Pembangunan Ekonomi

Pembangunan pedesaan di bidang ekonomi dilakukan karena kebutuhan pangan merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi pemerintah dimana pembangunan ekonomi adalah suatu hal yang harus terus menerus dilakukan dan merupakan indikator keberhasilan suatu pembangunan. Sadono Sukirno (1985:13) mendefinisikan pembangunan ekonomi sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Definisi tersebut mengandung pengertian bahwa pembangunan ekonomi merupakan suatu perubahan yang terjadi secara terus-menerus melalui serangkaian kombinasi proses demi mencapai sesuatu yang lebih baik yaitu adanya peningkatan pendapatan perkapita yang terus menerus berlangsung dalam jangka panjang. Hal ini berarti bahwa, dengan peningkatan pendapatan yang berlangsung terus menerus dalam kondisi baik akan menjadi indikator keberhasilan pembangunan. Menurut Adam Smith pembangunan ekonomi merupakan proses perpaduan antara pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi (Suryana, 2000:55). Todaro (dalam Lepi T. Tarmidi, 1992:11) mengartikan pembangunan sebagai suatu proses multidimensional yang menyangkut perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, kelembagaan nasional maupun percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketidakmerataan dan penghapusan dari kemiskinan mutlak. Pembangunan ekonomi menurut Irawan (2002: 5) adalah usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang seringkali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil perkapita.

Dalam pembangunan ekonomi, terdapat banyak faktor yang

mempengaruhi, faktor tersebut antara lain adalah :

- 1) ketersediaan SDM yang mumpuni, dimana sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam proses pembangunan, cepat lambatnya proses pembangunan tergantung kepada sejauhmana sumber daya manusianya selaku subjek pembangunan memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan proses pembangunan sumberdaya alam,
- 2) Faktor Sumber Daya Alam, sebagian besar negara berkembang bertumpu kepada sumber daya alam dalam melaksanakan proses pembangunannya. Namun demikian, sumber daya alam saja tidak menjamin keberhasilan proses pembangunan ekonomi, apabila tidak didukung oleh kemampuan sumber daya manusianya dalam mengelola sumber daya alam yang tersedia. Sumber daya alam yang dimaksud diantaranya kesuburan tanah, kekayaan mineral, tambang, kekayaan hasil hutan dan kekayaan laut.
- 3) Faktor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat mendorong adanya percepatan proses pembangunan, pergantian pola kerja yang semula menggunakan tangan manusia digantikan oleh mesin-mesin canggih berdampak kepada aspek efisiensi, kualitas dan kuantitas serangkaian aktivitas pembangunan ekonomi yang dilakukan dan pada akhirnya berakibat pada percepatan laju pertumbuhan perekonomian.
- 4) Faktor Budaya, Faktor budaya memberikan dampak tersendiri terhadap pembangunan ekonomi yang dilakukan, faktor ini dapat berfungsi sebagai pembangkit atau pendorong proses pembangunan tetapi dapat juga

menjadi penghambat pembangunan. Budaya yang dapat mendorong pembangunan diantaranya sikap kerja keras dan kerja cerdas, jujur, ulet dan sebagainya. Adapun budaya yang dapat menghambat proses pembangunan diantaranya sikap anarkis, egois, boros, KKN, dan sebagainya.

- 5) Sumber Daya Modal, Sumber daya modal dibutuhkan manusia untuk mengolah SDA dan meningkatkan kualitas IPTEK. Sumber daya modal berupa barang-barang modal sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi karena barang-barang modal juga dapat meningkatkan produktivitas.

Pembangunan ekonomi lokal mandiri berbasis produksi didasarkan pada kekayaan alam sesuai dengan wilayah desa yang ada sehingga bisa lebih mengeksplor kondisi wilayah sesuai dengan budaya, pemahaman tata kerja yang sudah ada sehingga pembangunan ekonomi akan lebih cepat terjadi tinggal menunggu pengelolaan dan manajemen yang baik yang biasanya kurang dimiliki oleh petani di pedesaan. Oleh karena itu diperlukan pendekatan pembangunan yang dapat menopang keberhasilan pembangunan pedesaan.

Pemberdayaan

Banyak pendapat dan teori tentang pemberdayaan, salah satunya adalah pendapat Subejo dan Narimo (2004) dalam Mardikanto (2010) yang mengartikan proses pemberdayaan masyarakat merupakan upaya yang disengaja untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumberdaya lokal yang dimiliki melalui *collective action* dan *networking* sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi dan social.”

Friedmann (1992) menawarkan konsep atau strategi pembangunan yang populer disebut dengan *empowerment* atau pemberdayaan. Konsep pemberdayaan ini adalah sebagai suatu konsep alternatif pembangunan yang pada intinya memberikan tekanan pada otonomi dalam mengambil keputusan di suatu kelompok masyarakat yang dilandaskan pada sumberdaya pribadi, bersifat langsung, demokratis dan pembelajaran sosial melalui pengalaman langsung. Fokus utama pemberdayaan, menurut Friedmann, adalah sumberdaya lokal, namun bukan berarti mengabaikan unsur-unsur lain yang berada di luar kelompok masyarakat, bukan hanya ekonomi akan tetapi juga politik, agar masyarakat memiliki posisi tawar menawar yang seimbang, baik ditingkat lokal, nasional maupun internasional.

Sedang menurut Kartasasmita dalam Aziz (2005) menyatakan bahwa pemberdayaan adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai social. Masih dalam buku yang sama Aziz (2005) menyebutkan bahwa konsep pemberdayaan pada dasarnya lebih luas dari hanya semata mata memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses kemiskinan lebih lanjut (*safety need*) yang pemikirannya belakangan ini banyak dikembangkan sebagai usaha mencari alternative terhadap konsep pertumbuhan di masa lalu. Konsep ini berkembang dari upaya banyak ahli dan praktisi untuk mencari apa yang antara lain oleh John Freidman disebut *alternative development*, yang menghendaki *inclusive democracy*, *appropriate economic growth*, *gender quality*, dan *intergenerational equity*.

Pengertian Agribisnis

Menurut **Sjarkowidan Sufri (2004)** agribisnis adalah setiap usaha yang berkaitan dengan kegiatan produksi

pertanian, yang meliputi pengusahaan input pertanian dan atau pengusahaan produksi itu sendiri ataupun juga pengusahaan pengelolaan hasil pertanian. Agribisnis, dengan perkataan lain, adalah cara pandang ekonomi bagi usaha penyediaan pangan. Sebagai subjek akademik, agribisnis mempelajari strategi memperoleh keuntungan dengan mengelola aspek budidaya, penyediaan bahan baku, pascapanen, proses pengolahan, hingga tahap pemasaran. Sedangkan menurut Wibowo dkk (1994) menyatakan bahwa agribisnis mengacu kepada semua aktivitas mulai dari pengadaan, prosesing, penyaluran sampai pada pemasaran produk yang dihasilkan oleh suatu usahatani atau agroindustri yang saling terkait satu sama lain. Dengan demikian agribisnis dapat dipandang sebagai suatu sistim pertanian yang memiliki beberapa komponen sub sistim yaitu, sub sistim usahatani/ yang memproduksi bahan baku; sub sistim pengolahan hasil pertanian, dan sub sistim pemasaran hasil pertanian. kepada semua aktivitas mulai dari pengadaan, prosesing, penyaluran sampai pada pemasaran produk yang dihasilkan oleh suatu usahatani atau agroindustri yang saling terkait satu sama lain. Dengan demikian agribisnis dapat dipandang sebagai suatu sistim pertanian yang memiliki beberapa komponen sub sistim yaitu, sub sistim usahatani/ yang memproduksi bahan baku; sub sistim pengolahan hasil pertanian, dan sub sistim pemasaran hasil pertanian.

Berbeda dengan pembangunan di masa lalu, dimana pembangunan pertanian dengan pembangunan industri dan jasa berjalan sendiri-sendiri, bahkan cenderung saling terlepas (*decoupling*), dimasa yang akan datang pemerintah akan mengembangkannya secara sinergis melalui pembangunan sistem agribisnis

yang mencakup empat subsistem sebagai berikut:

- 1) Sub-sistem agribisnis hulu (*up-stream agribusiness*), yakni industri-industri yang menghasilkan barang-barang modal bagi pertanian, seperti industri perbenihan/pembibitan, tanaman, ternak, ikan, industri agrokimia (pupuk, pestisida, obat, vaksin ternak./ikan), industri alat dan mesin pertanian (agro-otomotif);
- 2) Sub-sistem pertanian primer (*on-farm agribusiness*), yaitu kegiatan budidaya yang menghasilkan komoditi pertanian primer (usahatani tanaman pangan, usahatani hortikultura, usahatani tanaman obat-obatan (biofarmaka), usaha perkebunan, usaha peternakan, usaha perikanan, dan usaha kehutanan);
- 3) Sub-sistem agribisnis hilir (*down-stream agribusiness*), yaitu industri-industri yang mengolah komoditi pertanian primer menjadi olahan seperti industri makanan./minuman, industri pakan, industri barang-barang serat alam, industri farmasi, industri bio-energi dll; dan
- 4) Sub-sistem penyedia jasa agribisnis (*services for agribusiness*) seperti perkreditan, transportasi dan pergudangan, Litbang, Pendidikan SDM, dan kebijakan ekonomi.

Dengan lingkup pembangunan sistem agribisnis tersebut, maka pembangunan industri, pertanian dan jasa saling memperkuat dan konvergen pada produksi produk-produk agribisnis yang dibutuhkan pasar. Agribisnis (*Agribusiness Led Development*) yakni suatu strategi pembangunan ekonomi yang mengintegrasikan pembangunan pertanian (termasuk perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan) dengan pembangunan industri hulu dan

hilir pertanian serta sektor-sektor jasa yang terkait di dalamnya.

Dilihat dari berbagai aspek, seperti potensi sumberdaya yang dimiliki, arah kebijakan pembangunan nasional, potensi pasar domestik dan internasional produk-produk agribisnis, dan peta kompetisi dunia, Indonesia memiliki prospek untuk mengembangkan sistem agribisnis. Prospek ini secara aktual dan faktual ini didukung oleh hal-hal sebagai berikut:

Pertama, pembangunan sistem agribisnis di Indonesia telah menjadi keputusan politik. Rakyat melalui MPR telah memberi arah pembangunan ekonomi sebagaimana dimuat dalam GBHN 1999-2004 yang antara lain mengamanatkan pembangunan keunggulan komparatif Indonesia sebagai negara agraris dan maritim. Arah GBHN tersebut tidak lain adalah pembangunan sistem agribisnis.

Kedua, pembangunan sistem agribisnis juga searah dengan amanat konstitusi yakni No. 22 tahun 1999, UU No. 25 tahun 1999 dan PP 25 tahun 2000 tentang pelaksanaan Otonomi Daerah. Dari segi ekonomi, esensi Otonomi Daerah adalah mempercepat pembangunan ekonomi daerah dengan mendayagunakan sumberdaya yang tersedia di setiap daerah, yang tidak lain adalah sumberdaya di bidang agribisnis. Selain itu, pada saat ini hampir seluruh daerah struktur perekonomiannya (pembentukan PDRB, penyerapan tenaga kerja, kesempatan berusaha, eskpor) sebagian besar (sekitar 80 persen) disumbang oleh agribisnis. Karena itu, pembangunan sistem agribisnis identik dengan pembangunan ekonomi daerah.

Ketiga, Indonesia memiliki keunggulan komparatif (*comparative advantage*) dalam agribisnis. Kita memiliki kekayaan keragaman hayati (*biodiversity*) daratan dan perairan yang

terbesar di dunia, lahan yang relatif luas dan subur, dan agroklimat yang bersahabat untuk agribisnis. Dari kekayaan sumberdaya yang kita miliki hampir tak terbatas produk-produk agribisnis yang dapat dihasilkan dari bumi Indoensia. Selain itu, Indonesia saat ini memiliki sumberdaya manusia (SDM) agribisnis, modal sosial (kelembagaan petani, *local wisdom*, *indegenous technologies*) yang kuat dan infrastruktur agribisnis yang relatif lengkap untuk membangun sistem agribisnis.

Keempat, pembangunan sistem agribisnis yang berbasis pada sumberdaya domestik (*domestic resources based, high local content*) tidak memerlukan impor dan pembiayaan eksternal (utang luar negeri) yang besar. Hal ini sesuai dengan tuntutan pembangunan ke depan yang menghendaki tidak lagi menambah utang luar negeri karena utang luar negeri Indonesia yang sudah terlalu besar.

Kelima, dalam menghadapi persaingan ekonomi global, Indonesia tidak mungkin mampu bersaing pada produk-produk yang sudah dikuasai negara maju. Indonesia tidak mampu bersaing dalam

industri otomotif, eletronika, dll dengan negara maju seperti Jepang, Korea Selatan.

KERANGKA ANALISIS KEBIJAKAN

Objectif – Constraints – Policies - Strategy

Menurut Pearson dkk (2005) komponen utama dari *framework* kebijakan pertanian adalah tujuan (*objectives*), kendala (*constraints*), kebijakan (*policies*), dan strategi (*strategies*). Ojectives adalah tujuan yang diharapkan bisa dicapai oleh sebuah kebijakan ekonomi oleh para

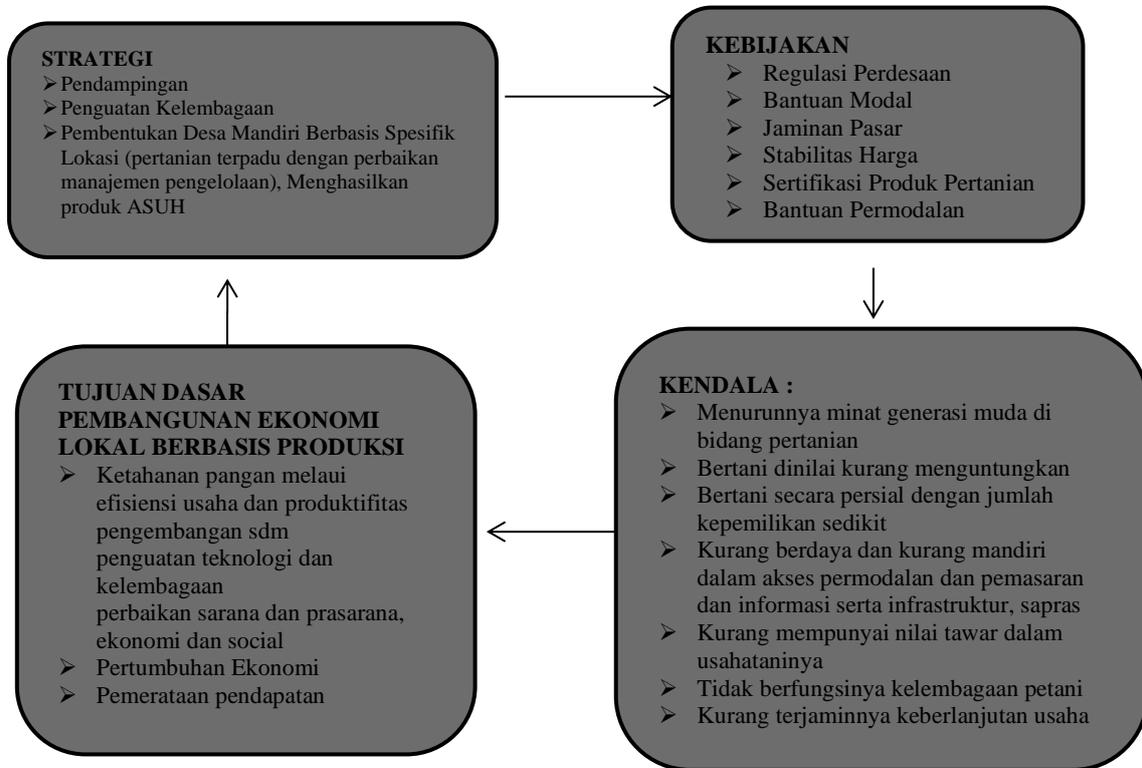
pembuat kebijakan. *Constraints* adalah keadaan yang membuat apa yang bisa dicapai menjadi terbatas. Kebijakan terdiri atas berbagai instrument yang bisa digunakan pemerintah untuk mengubah outcome perekonomian, dimana sebuah kebijakan yang efektif akan mengubah perilaku produsen, pedagang, dan konsumen dan menciptakan outcome baru dari sebuah perekonomian. Sedangkan *strategy* adalah seperangkat instrument kebijakan yang terkoordinasi dengan baik.

Kerangka *analysis* yang dibuat adalah untuk memilih pemahaman/pemikiran yang jelas dalam mengevaluasi sebuah keputusan, apa dasar sebuah alat kebijakan dikatakan lebih dari yang lain, bagaimana suatu kebijakan dikatakan memadai dan apakah efisiensi menjadi satu-satunya pertimbangan sehingga dibutuhkan cara yang jelas dan logis dalam menilai berbagai pilihan kebijakan. Bagan atau kerangka analisis yang dibuat adalah untuk menggambarkan adanya sebuah hubungan sebab akibat dari keempat komponen sebagaimana disampaikan pada Gambar 1.

Keempat komponen tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan outcome ekonomi dengan tujuan paling akhir adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat di perdesaan.

Dalam implementasinya kebijakan yang disusun pasti akan mengalami hambatan atau kendala untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Penilaian atau evaluasi terhadap pencapaian tujuan memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian strategi yang telah ditetapkan apabila diperlukan. Dalam prosesnya, pemerintah membuat strategi pembangunan pertanian dengan menentukan seperangkat kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan kendala ekonomi pada sektor pertanian.

Sehingga kesimpulannya telaahan yang mendalam atas masing-masing komponen dalam analisis kebijakan adalah penting.



Gambar 1. Kerangka Analisis Kebijakan Model Pearson (2005)

Pembangunan Ekonomi Lokal Mandiri Berbasis Produksi

Usaha pertanian yang menghasilkan produk pertanian yang aman, sehat, utuh dan halal serta bersifat organik adalah syarat utama produk yang dapat bersaing di era MEA. Selama ini kondisi usaha pertanian masih sedikit sekali yang mengarah pada usaha pertanian yang ASUH. Secara umum sistim usahatani yang ada hampir sebagian besar bersifat tradisional, dimana petani sebagian besar kurang bisa dan mampu menerima perubahan terutama di bidang teknologi machinery dan teknologi informasi, kurang bisa mengakses, permodalan, dan teknologi

serta pemasaran. Dalam berusaha tani masih secara parsial, yang berdampak pada kurang terjaminnya kelangsungan usaha. Kondisi tersebut diperparah dengan menurunnya minat pemuda tani untuk berkecimpung di dunia pertanian, yang menganggap dunia pertanian kurang menjanjikan bagi kelangsungan hidup mereka. Di sisi lain sebenarnya masih terdapat potensi dari petani yang meliputi lama berusahatani, modal sosial dan modal fisik dan dukungan dari pengambil kebijakan dan *stake holder* lainnya. Pendampingan pada program pemberdayaan masyarakat dalam membentuk kelembagaan petani dan system usaha berbasis agribisnis dalam

mewujudkan desa mandiri spesifik lokasi dapat mewujudkan pembangunan ekonomi lokal mandiri berbasis produksi.

Objectives

Tujuan dari pembangunan ekonomi lokal mandiri berbasis produksi adalah upaya menjamim ketahanan pangan bagi masyarakat di pedesaan melalui efisiensi dan produktifitas usaha. Selama ini usaha petani di pedesaan dilakukan sendiri-sendiri dengan banyak komoditas dan dalam skala usaha kecil sehingga tidak memiliki nilai tawar karena keberlanjutan usaha yang diragukan.

Berdasarkan studi literatur yang dilakukan diperoleh hasil bahwa banyak program usaha pertanian yang dilakukan oleh petani dewasa ini. Salah satunya adalah sistim usahatani terpadu sebagai ekspresi dari usaha mereka menghadapi tantangan lingkungan yang ada untuk bertahan hidup seperti yang disampaikan oleh Prajitno (1992) dalam Prajitno (2009) pada naskah pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Pertanian UGM. Lebih lanjut disampaikan bahwa usahatani terpadu tersebut dilakukan sepotong-sepotong tidak terintegrasi. Hal ini merupakan penyebab mengapa hingga saat ini program pengembangan system pertanian berkelanjutan mengalami kemadegan, hanya sampai pada tingkat konsep. Terdapat system usahatani yang sudah terencana dengan matang misalnya usaha pertanian terpadu dan terencana melalui pendekatan usahatani daur biologi yaitu program *Agro Techno Park* yang diselenggarakan oleh Kementerian Ristek Dikti (Anonym, 2009) hanya pelaksanaannya banyak mengalami hambatan. Sebagai contoh misalnya di daerah Sumatera Selatan dari 1000 hektar ATP yang dicanangkan di Tahun 2003, hanya sekitar 10 % atau sekitar 70 hektar yang terealisasi

dilaksanakan di tahun 2008. Program dalam bentuk lain dilakukan oleh Litbang Deptan yang mengintegrasikan system usahatani terpadu antara jagung dan sapi potong di lahan sawah dapat meningkatkan 40% pendapatan serta efisiensi penggunaan hijauan makanan ternak sampai 4 – 5 kali lipat (Anonim, 2009b).

Dirjen Bina Produksi Peternakan Tahun 2002 menerapkan Program Sistem Integrasi Padi Ternak (SIPT) yang lazimnya disebut *Crop Livestock System* (CLS) yang bertujuan untuk pengembangan penggemukan ternak sapi potong berbasis tanaman pangan. Program SIPT merupakan salah satu alternative dalam peningkatan produksi padi, daging, susu, dan sekaligus meningkatkan pendapatan petani (Hayanto B, 2002). Namun demikian secara umum tidak semua usaha pertanian di pedesaan mendapat program dan mendapat pendampingan sehingga tetap saja kesejahteraan jauh dari harapan.

Dari beberapa jenis program yang dilakukan terlihat bahwa pengelolaan usaha pertanian yang dilakukan walaupun sudah diintegrasikan tetapi masih dalam tataran budidaya atau kegiatan *on farm* dan belum memfungsikan system agribisnis secara terpadu. Padahal agribisnis sebagai suatu sistem adalah merupakan seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan yang terdiri dari 5 sub sistem yang tergabung dalam rangkaian interaksi dan interpedensi secara reguler, serta terorganisir sebagai suatu totalitas yang apabila diterapkan dalam budidaya akan lebih menguntungkan. Mengapa penerapan ke 5 sub system agribisnis dirasakan lebih menguntungkan hal ini akan terjawab melalui pendapat Sjarkowidan Sufri (2004) yang menyatakan bahwa agribisnis adalah setiap usaha yang berkaitan dengan

kegiatan produksi pertanian, yang meliputi perusahaan input pertanian dan atau perusahaan produksi itu sendiri ataupun juga perusahaan pengelolaan hasil pertanian. Diperlukan sentuhan manajemen dan teknologi yang *up to date* sehingga pertanian di daerah pedesaan lebih cepat maju. Selain itu pembangunan infrastruktur dan peningkatan pengetahuan ketrampilan dan sikap petani juga harus dilakukan pembangunan seiring dengan aspek lain. Memang tidak mudah akan tetapi apabila fokus dan konsentrasi semua unsur baik masyarakat dan pemerintah dalam pengelolaannya sesuatu yang dirasa sulit dapat terurai dengan komitmen bersama. Dalam pembangunan ekonomi banyak faktor yang harus diperhatikan antara lain faktor SDM, SDA, Modal, Budaya dan Teknologi. Apabila beberapa aspek tersebut bisa dimanage dan dikelola secara konsisten dan kontinyu maka harapan akan bertumbuhnya ekonomi akan dapat terwujud sehingga pemerataan pendapatan menjadi lebih baik untuk dapat mengimbangi masyarakat perkotaan tanpa harus bermigrasi dan meninggalkan desa sebagai mata pencaharian utama mereka.

Constraint

Untuk mencapai tujuan yang ditetapkan terdapat banyak kendala dalam pelaksanaannya. Menurunnya minat generasi muda di bidang pertanian menjadi salah satu kendala dalam memajukan ekonomi pedesaan. Mereka menganggap dan berasumsi bahwa bertani kurang menjanjikan yang diperparah dengan system berusahatani yang masih parsial dan masih pada orientasi skala rumah tangga dan berkutat pada aspek budidaya. Aspek lain yang dinilai menghambat pembangunan ekonomi di pedesaan adalah minimnya modal dan akses terhadap modal dan pemasaran. Dengan modal terbatas tentu saja pengembangan

usaha sulit dilakukan, belum lagi ditambah dengan pengetahuan dan ketrampilan tentang teknologi yang kurang. Petani akan lebih berdaya dan mempunyai kekuatan besar apabila mereka membentuk kelompok, namun demikian tidak sedikit kelompok di daerah pedesaan hanya mempunyai nama tetapi tidak ada aktifitas. Kelompok tidak berkembang sebagaimana seharusnya, berkelompok ketika mendapatkan bantuan dan akan menghilang ketika bantuan tersebut selesai. Apabila hal tersebut di atas dibiarkan tidak menutup kemungkinan akan terjadi migrasi besar besaran dimana hal tersebut akan berdampak pada usaha pertanian di pedesaan.

Kebijakan Pemerintah

Untuk mensejahterakan masyarakat pedesaan dengan segala permasalahannya maka kebijakan yang berpihak pada rakyat pedesaan sangat diperlukan. Diterbitkannya Undang-Undang Tentang Desa Nomor 6 Tahun 2014 merupakan upaya pemerintah memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada pemerintah desa untuk menyelenggarakan pemerintahan paling bawah dalam situasi yang jelas dan menjadi pelaku yang memiliki otoritas dalam penyelenggaraan pemerintah. Hal ini tentu saja memberikan peluang bagi warga desa untuk bisa mengembangkan diri ke arah lebih baik lagi. Kebijakan lain yang dilakukan oleh pemerintah dalam membangun perekonomian desa adalah dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah tentang Dana Desa No 60 Tahun 2014, dana desa yang diberikan kepada 33 propinsi untuk disalurkan ke desa yang ditunjuk di tahun 2015 adalah sebesar Rp. 9.066.100.999. 794 (Anomin, 2015).

Dengan PP tersebut pemerintah memberikan peluang dan kesempatan bagi pemerintah desa dan kewajiban masyarakat desa untuk memegang

amanah demi peningkatan kesejahteraan seperti yang diinginkan. Pemberian dana desa berasal dari pusat ditambah dengan alokasi dana desa yang berasal dari pendapatan desa itu sendiri, pajak dan retribusi dikonsentrasikan pada pembagunan dan pemberdayaan masyarakat di perdesaan dengan prioritas kegiatan untuk :

- 1) Pembangunan dengan prioritas pembangunan antara lain meliputi :
 - a) pembangunan infrastruktur desa, perahu dan jalan pemukiman,
 - b) Jalan desa antar pemukiman ke wilayah pertanian dan prasana kesehatan, desa seperti air bersih, sanitasi lingkungan dan posyandu,
 - c) Sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan seperti taman bacaan masyarakat, pendidikan usia dini dan balai pelatihan atau kegiatan belajar masyarakat desa,
 - d) Sarana dan prasarana ekonomi produktif.
- 2) Sedangkan prioritas pemberdayaan masyarakat antara lain berupa :
 - a) Pelatihan usaha ekonomi pertanian, perikanan dan perdagangan,
 - b) Pelatihan teknologi tepat guna,
 - c) Peningkatan kapasitas masyarakat termasuk kelompok usaha ekonomi, kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok pengrajin dan kelompok perempuan
 - d) Sertifikasi produk pertanian

Selain regulasi dan bantuan permodalan yang diberikan untuk pengembangan usaha, penetapan stabilitas harga untuk semua komoditas pertanian hendaknya dilakukan. Hal tersebut adalah salah satu bentuk proteksi dari pemerintah untuk melindungi rakyatnya dari permainan harga di pasaran. Stabilitas harga yang selama ini ada masih berlaku pada produk-produk pangan misalnya padi,

gula dan beberapa komoditas lain. Bahkan pemerintah telah memberikan asuransi kepada petani padi yang mengalami gagal panen untuk dapat mengklaim dan mendapatkan ganti rugi kepada pemerintah. Seandainya kondisi tersebut dapat menjangkau produk pertanian lainnya akan dapat merangsang petani dalam menjalankan usahanya.

Hal lain yang menjadi permasalahan dan harus mendapat para pengambil kebijakan adalah jaminan pemasaran hasil pertanian. Banyak petani merugi dikarenakan kondisi pasar yang tak menentu. Kebijakan pemerintah dalam memotong rantai pemasaran dan regulasi tentang pemasaran diperketat kemungkinan peluang masyarakat untuk mendapatkan keuntungan akan menjadi lebih baik.

Side effect

Dari kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk memberikan bantuan modal kepada desa dengan nilai fantastik yaitu sekitar 1 M tiap desa, menuai permasalahan yang tidak kalah serius yaitu belum siapnya sumberdaya manusia di perdesaan dalam membuat perencanaan desa mengingat SDM pedesaan belum kompeten. Hal ini menyebabkan lambatnya penyaluran dana dalam rangka menggerakkan sektor ekonomi desa. Hal ini perlu mendapat perhatian pemerintah mengingat desa adalah penggerak sektor ekonomi riil di Desa.

Strategy

Melihat tujuan dari kebijakan yang dibuat terdapat beberapa kendala yang ditemukan. Untuk mengatasi kendala yang ada strategi yang paling memungkinkan adalah melakukan pendampingan kepada sumberdaya manusia pertanian di pedesaan. Pendampingan yang dilakukan meliputi asistensi, pengorganisasian, pengarahan

dan fasilitasi desa dalam rangka menciptakan desa yang kuat, maju, mandiri dan demokratis. Pendampingan adalah konkritasi dari pemberdayaan. Secara operasional pemberdayaan yang dilakukan adalah dengan pembentukan atau penguatan kelembagaan. Selama ini banyak kelembagaan petani yang tidak melembaga, artinya petani ikut kegiatan kelembagaan karena keterpaksaan atau karena adanya bantuan. Sehingga kelembagaan yang dibentuk tidak bertahan lama segera akan bubar setelah program bantuan selesai. Selama ini petani dalam menjalankan usahatani tidak memperhatikan system usahatani yang baik, terkesan seadanya dengan hasil yang kurang maksimal. Permasalahan utama yang ditemui petani adalah kurangnya modal dan teknologi baru, teknik pemasaran dan akses informasi. Dengan dibentuknya kelembagaan yang solid diharapkan Pembentukan Desa Mandiri Berbasis Spesifik Lokalit dapat diwujudkan.

Usulan perbaikan Sistem Usahatani di pedesaan

Salah satu cara yang dapat ditempuh untuk memperbaiki kondisi usaha pertanian di pedesaan adalah program pemberdayaan. Selama ini terdapat banyak program pemberdayaan yang dibuat dan diusulkan, akan tetapi sedikit program yang dapat dilakoni secara kontinyu untuk terus diterapkan pada usahatani mereka. Padahal potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia masih bisa dikembangkan dengan kawalan dan fasilitasi yang dapat meningkatkan posisi tawar mereka. Salah satu penyebab adalah kurang kuatnya kelembagaan petani sehingga berdampak pada tidak berlanjutnya program pemberdayaan yang dilakukan. Terdapat banyak kasus yang melemahkan posisi petani karena adanya kelompok tani fiktif, yang eksis ketika

saat akan diturunkan dana bantuan pemerintah, kurangnya pengetahuan dan ketrampilan petani dalam mengelola usaha terkait dengan bantuan yang diberikan, rendahnya *economic of skill* dan banyak faktor lain yang menjadi fenomena saat ini kenapa usahatani menjadikan usaha yang dianggap kurang menjanjikan.

Dalam pelaksanaan pemberdayaan harus total melihat segala potensi dan masalah perekonomian di pedesaan.. Fokus pertanian berbasis Agribisnis dengan merapkan 5 sub system agribisnis merupakan hal yang paling sesuai untuk diterapkan dengan melihat usaha pertanian di tingkat petani selama ini. Mengapa agribisnis harus dilakukan hal ini merujuk pada pemahaman agribisnis sebagai subjek akademik adalah mempelajari strategi memperoleh keuntungan dengan mengelola aspek budidaya, penyediaan bahan baku, pasca panen, proses pengolahan, hingga tahap pemasaran. Secara konseptual Sistem Agribisnis adalah semua aktivitas mulai dari pengadaan dan penyaluran sarana produksi sampai kepada pemasaran produk-produk yang dihasilkan oleh usaha tani dan agroindustry yang saling terkait satu sama lain.

Menilik pengertian tentang definisi agribisnis secara umum dan apabila diterapkan dalam sistim usahatani di pedesaan akan lebih mengoptimalkan pendapatan petani dengan tujuan akhir peningkatan kesejahteraan. Namun demikian upaya penerapan sub system agribisnis dalam pengelolaan usahatani dalam mewujudkan Desa Mandiri Spesifik Lokalit tidak semudah membalik telapak tangan. Hal ini dikarenakan secara umum kondisi petani di pedesaan mengusahakan banyak komoditas pertanian dengan skala usaha yang relative kecil disertai dengan rendahnya *economic of skill* , rendahnya pengetahuan dan ketrampilan petani

dalam akses informasi pasar, teknologi dan pemasaran produk.

Melihat rendahnya posisi tawar petani dalam mengelola usahanya maka diperlukan suatu pendekatan yang dapat membantu mereka agar lebih berdaya dengan memanfaatkan potensi yang mereka miliki. Pemberdayaan adalah kata yang paling tepat dalam membangun kawasan pertanian mandiri dimana segala keperluan diupayakan diperoleh dari dan untuk petani didasarkan pada pengembangan usaha spesifik lokasi untuk mewujudkan Desa Industri Pertanian Mandiri. Seperti yang disampaikan Subejo dan Narimo (2004) dalam Mardikanto (2010) yang mengartikan proses pemberdayaan masyarakat merupakan upaya yang disengaja untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumberdaya lokal yang dimiliki melalui *collective action* dan *networking* sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi dan social.”

Untuk membentuk Desa Mandiri Spesifik Lokasi diperlukan langkah-langkah strategis dengan memberdayakan keseluruhan potensi desa sesuai dengan konsep pemberdayaan yaitu upaya-upaya peningkatan efisiensi usaha dan produktivitas melalui pengembangan SDM penguatan teknologi dan kelembagaan serta perbaikan sarana dan prasarana ekonomi dan social. Upaya tersebut dilakukan dengan perbaikan system usahatani yang tidak lagi focus pada aspek *on farm* tetapi sudah mulai berpikir bagaimana pengelolaan pasca panen dan upaya pemasaran dengan menjalin *networking* dengan pihak lain di luar.

Strategi pemberdayaan dalam pembangunan masyarakat merupakan upaya yang dilakukan untuk

meningkatkan dan memandirikan, serta menswadayakan masyarakat sesuai dengan potensi dan budaya lokal yang dimilikinya secara utuh dan komprehensif agar harkat dan mertabat lapisan masyarakat yang kondisinya tidak mampu dapat melepaskan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan. Pemberdayaan tidak hanya meliputi penguatan individu, tetapi juga berbagai pranatanya (institutions), misalnya dalam bentuk penanaman nilai-nilai budaya modern - seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, dan sikap bertanggung jawab adalah menjadi bagian dari proses pemberdayaan. Demikian pula, pemberdayaan juga menyangkut pembaharuan lembaga sosial dan pengintegrasian ke dalam kegiatan pembangunan serta peranan masyarakat di dalamnya, khususnya yang menyangkut partisipasi dalam pengambilan keputusan dalam proses pembangunan di lingkungannya. Atas dasar pandangan ini, pemberdayaan masyarakat amat erat kaitannya dengan pemantapan, pembudayaan, dan pengamalan nilai demokrasi. Dalam konteks ini, Friedmann (1992), menyatakan “*The empowerment approach, which is fundamental to an alternative development, places the emphasis on autonomy in the decision-making of territorially organized communities, local self-reliance (but not autarchy), direct (participatory) democracy, and experiential social learning*”.

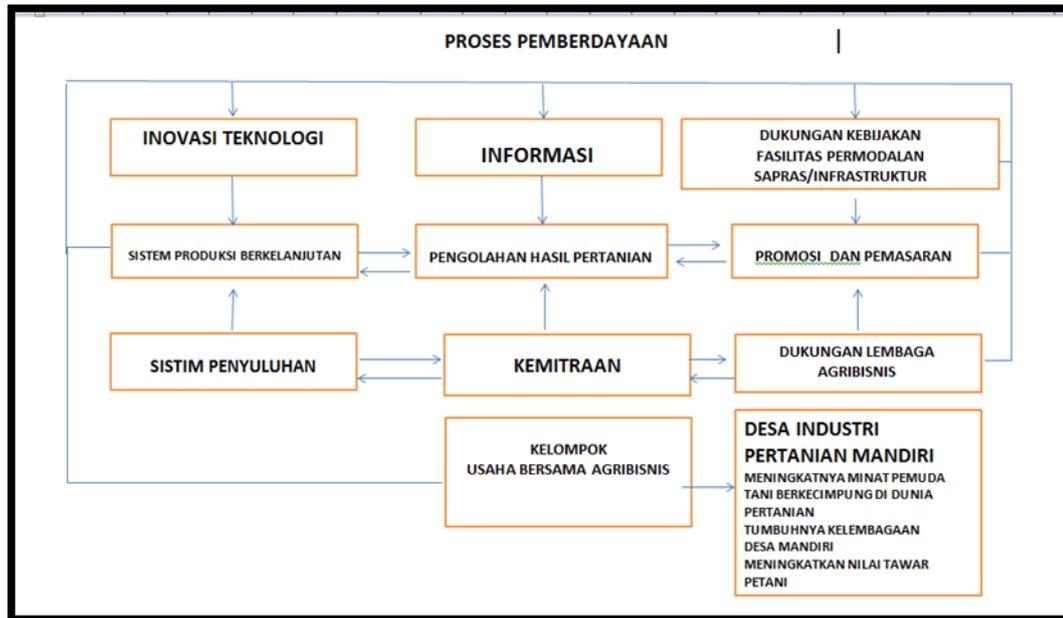
Salah satu kendala yang dapat diurai dengan beberapa kegiatan di atas, maka kucuran dana atau permodalan adalah salah satu faktor kunci keberhasilan suatu program. Dalam rangka perwujudan nawa cita ke 3, pemerintah dengan serius memberikan perhatian lebih pada masyarakat perdesaan. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, maka disusun model

pemberdayaan yang ditawarkan dalam rangka menumbuhkan Desa Mandiri berbasis Spesifik Lokalit. Proses pemberdayaan diawali dengan melakukan beberapa kegiatan sebagai berikut

1. Pengkajian desa secara partisipatif. Metode yang dapat dipergunakan dalam identifikasi usaha adalah menggunakan teknik PRA (*Participatory Rural Appraisal*). PRA merupakan seperangkat metode pendekatan untuk mempelajari kondisi dan kehidupan pedesaan dari, dengan, dan oleh masyarakat desa (Chambers, 1996). Terdapat beragam teknik yang dapat dipilih sesuai kebutuhan, namun demikian beberapa teknik seperti, (1) kalender musim; (2) perubahan dan kecenderungan; (3) matriks rangking, dapat dipergunakan. Selain itu, perlu dipertimbangkan juga aspek kesesuaian lahan, iklim, topografi, dan aspek yang berkaitan dengan alam, karena jenis usaha yang direncanakan di bidang pertanian.
2. Pembentukan Kelompok Usaha Bersama Agribisnis
Kelompok Usaha Bersama Agribisnis (KUBA) yang dibentuk merupakan kelompok tani dengan peserta seluruh masyarakat dalam satu kawasan
3. Penyusunan Program Kegiatan untuk tahap awal diperlukan bantuan

pemerintah dan instansi lainnya antara lain :

- a. Pelatihan beberapa warga yang dianggap mempunyai kemampuan segi teknik, social dan ekonomis, hasil pelatihan secara bertahap kepada petani lain dalam mewujudkan Desa Mandiri Spesifik Lokalit
- b. Merencanakan usaha berbasis agribisnis dari untuk dan oleh petani meliputi : 1) Penyediaan Sarana Produksi, 2) Subsistem Usahatani atau proses produksi, 3) Subsistem Agroindustri/pengolahan hasil, 4) Subsistem Pemasaran, 5) Subsistem Penunjang Subsistem ini merupakan penunjang kegiatan pra panen dan pasca panen yang meliputi: Sarana Tataniaga, Perbankan/perkreditan, Penyuluhan Agribisnis, Kelompok tani, Infrastruktur agribisnis, Koperasi Agribisnis, BUMN, Swasta, Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, Transportasi, Kebijakan Pemerintah, Strategi Pengembangan Agribisnis
- c. Selalu melakukan networking dengan semua lembaga
- d. Merencanakan monitoring dan evaluasi secara berkala.



Gambar 2. Proses Pemberdayaan dalam Mewujudkan Desa Mandiri

4. Pelaksanaan Program

Pada pelaksanaan program sesuai dengan Gambar 2 di atas bahwa, keterlibatan semua fungsi produksi dan aspek agribisnis harus bekerja secara simultan dan terus menerus dalam mensupport komoditas unggulan yang ditetapkan sebagai icon baik dari ketersediaan input, penanganan pasca panen sampai dengan pemasaran. Dalam bagan tersebut keterlibatan pemerintah, lembaga swasta lainnya diharapkan tetap mensuprot pembangunan desa demi terwujudnya Desa Mandiri Spesifik Lokalit.

Dalam pelaksanaannya salah satu pendekatan yang mulai banyak digunakan terutama oleh LSM adalah advokasi. Pendekatan advokasi pertama kali diperkenalkan pada pertengahan tahun 1960-an di Amerika Serikat (Davidoff, 1965). Model pendekatan ini mencoba meminjam pola yang diterapkan dalam sistem hukum, di mana penasehat hukum berhubungan langsung dengan klien. Dengan

demikian, pendekatan advokasi menekankan pada proses pendampingan kepada kelompok masyarakat dan membantu mereka untuk membuka akses kepada pelaku-pelaku pembangunan lainnya, membantu mereka mengorganisasikan diri, menggalang dan memobilisasi sumberdaya yang dapat dikuasai agar dapat meningkatkan posisi tawar (bargaining position) dari kelompok masyarakat tersebut. Pendekatan advokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pada hakekatnya masyarakat terdiri dari kelompok-kelompok yang masing-masing mempunyai kepentingan dan sistem nilai sendiri-sendiri. Masyarakat pada dasarnya bersifat majemuk, di mana kekuasaan tidak terdistribusi secara merata dan akses keberbagai sumberdaya tidak sama.

Dalam jangka panjang diharapkan dengan pendekatan advokasi masyarakat mampu secara sadar terlibat dalam setiap tahapan dari proses pembangunan, baik dalam

kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pelaporan, dan evaluasi. Seringkali pendekatan advokasi diartikan pula sebagai salah satu bentuk “penyadaran” secara langsung kepada masyarakat tentang hak dan kewajibannya dalam proses pembangunan.

KESIMPULAN

Model pemberdayaan yang diusulkan merupakan upaya pengentasan kemiskinan yang dimulai dari perbaikan sistim berusahatani, dimana selama ini masyarakat tani berusaha secara parsial dengan teknologi yang seadanya sehingga tidak memiliki nilai tawar. Dengan terwujudnya Desa Industri Pertanian Mandiri diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani karena semua system agribisnis diperoleh dan ditangani dari dan oleh mereka sendiri. Keterlibatan pemerintah dan stake holder lainnya tetap menjadi harapan demi kelancaran perwujudan model.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahab, S., 1999. *Ekonomi Politik Pembangunan: Bisnis Indonesia Era Orde Baru dan di Tengah Krisis moneter*. Malang: Dinar Wijaya, Brawijaya University Press.

-----, 1995. “Kebijakan Pembangunan Pedesaan Di Negara-negara Berkembang, Skala Permasalahan dan Hakekatnya”. Dalam *Kebijakan Publik dan Pembangunan*. IKIP Malang.

Ahmadi, Abu, 2003. *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta: Rineka Cipta.

Awang, San Afri, 1995. “Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Lokal dalam Program IDT: Studi

Kasus Tipologi Desa Hutan di Kabupaten Madiun”. Dalam Mubyarto (ed.), *Program IDT dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Aditya Media.

Aziz, M.A. dkk. 2005. *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat: Paradigma Aksi Metodologi*. Yogyakarta. Kelompok Penerbit LKiS.

Ellis, F. 1992. *Agricultural Policies in Developing Countries*. Cambridge: University Press

Friedmann 1992, *Empowerment. The Politics of Alternatif Development*. Cambridge. Mass : Blackwell. Publisher.

Hanafie, R. 2010. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Yogyakarta: Andi Offset.

Kartasasmita, G. 1996. *Pembelajaran Masyarakat : Konsep Pembangunan yang Berakar pada Masyarakat*. Jakarta. Bapenas.

Scott, P. dkk. 2005. *Aplikasi Policy Analysis Matrix pada Pertanian Indonesia*. Jakart.: Yayasan Obor Indonesia.

Yustika, Ahmad Erani. 2003. *Economic Analysis of Small Farm Households*. Brawijaya University Press. Malang.